



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENGARUH PENGELUARAN PEMERITAH, LUAS LAHAN DAN UPAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DALAM SEKTOR PERTANIAN DI SUMATERA BARAT

SKRIPSI



**SEPTA QAIDANI
0810512052**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2013**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Luas Lahan, Dan Upah Terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Sektor Pertanian Di Sumatera Barat**

Merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan *plagiat* dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 26 Januari 2014

Yang memberi pernyataan



Septa Qaidani

No.BP 0810512052

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Luas Lahan, dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dalam Sektor Pertanian di Sumatera Barat**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, kaum kerabatnya, dan umatnya hingga hari kemudian. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari tahap awal sampai pada tahap akhir penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bapak **Dr.H. Hefrizal Handra, M. Soc.sc**, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan **Dra. Leli Sumarni, MS, M.Si**, selaku Sekretaris Jurusan.

3. Bapak **Febriandi Prima Putra, SE, MSi**, selaku Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak **Fery Andrianus, SE, MSi** selaku pembimbing Akademik yang memberikan masukan dan bimbingan selama masa perkuliahan
5. Bapak **Prof.Dr.Nasri Bachtiar, SE, MSi** selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Drs.Zulkarnaini Ras,MSi** dan Ibu **Laksmi Dewi, SE, MSi** selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dalam seminar hasil dan telah memberikan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Bapak dan Ibu karyawan Biro Jurusan Ilmu Ekonomi dan pegawai Dekanat Fakultas Ekonomi yang telah membantu proses kelancaran administrasi selama penulis kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
9. Untuk keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dorongan tiada henti dalam menyelesaikan studi ini

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

Padang, 26 Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN LITERATUR	
2.1 Tinjauan Teoritis	
2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja	11
2.1.1.1 Teori Permintaan Tenaga kerja	12
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah	15
2.1.2.1 Hukum Adolf Wagner	16
2.1.2.2 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.1.3 Konsep dan Teori Tingkat Upah	20
2.1.3.1 Jenis Upah	21
2.1.4 Konsep dan Defenisi Lahan.....	23
2.1.4.1 Penggunaan Lahan	24
2.2 Penelitian Terdahulu	25

2.3 Hipotesis	28
---------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data	29
3.2. Pembentukan Model	29
3.3 Identifikasi Variabel	30
3.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data	31
3.5. Uji Asumsi Klasik	31
3.5.1 Uji Normalitas	31
3.5.2. Uji Multikolinearitas	32
3.5.3 Uji Heteroskedastisitas	32
3.5.4 Uji Autokorelasi	33
3.6 Pengujian Hipotesis Statistik	34
3.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)	34
3.6.2 Uji F (F-Test)	35
3.6.3 Uji t (t-test)	36

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Perkembangan PDRB Sektor Pertanian di Sumatera Barat	37
4.2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Sumatera Barat	41
4.3 Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Sumatera Barat.....	43
4.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian di Sumatera Barat	47
4.5 Upah Pekerja Pertanian di Sumatera Barat	49
4.6 Luas Lahan Pertanian Sumatera Barat	51

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1	Analisis Data	53
5.1.1	Analisis Linear Berganda	53
5.1.2	Uji Asumsi Klasik	54
5.1.2.1	Uji Autokorelasi	55
5.1.2.2	Uji Multikolinearitas	56
5.1.2.3	Uji Heteroskedastisitas	57
5.1.3	Pengujian Hipotesis	58
5.1.3.1	Uji Hipotesis Secara Simultan (F-Tes).....	58
5.1.3.2	Uji Pengaruh Parsial (T-Tes).....	58
1.	Pengaruh Investasi Pemerintah untuk Sektor Pertanian Terhadap Permintaan Tenaga Kerja	59
2.	Pengaruh Upah Pekerja Pertanian Terhadap Permintaan Permintaan Tenaga Kerja	60
3.	Pengaruh Luas Lahan Pertanian Terhadap Permintaan Tenaga Kerja.....	60
5.1.4	Koefisien Determinasi (R^2)	60
5.2	Pembahasan Hasil	61
5.3	Implikasi Kebijakan	64

BAB VI PENUTUP

6.1	Kesimpulan.....	66
6.2	Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nilai Teoritik Durbin Watson	34
Tabel 4.1 PDRB Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha 2009 – 2011	38
Tabel 4.2 Distribusi Persentase PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha	38
Tabel 4.3 PDRB Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Sub Sektor Pertanian Sumatera Barat 2009 - 2011	39
Tabel 4.4 Jumlah dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Sumatera Barat, Atas Dasar Harga Konstan 2000, 1998 – 2011.....	40
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Barat, 1998 – 2011..	42
Tabel 4.6 Jumlah Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Sumatera Barat, 1998 – 2011	45
Tabel 4.7 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian di Sumatera Barat, 1998 – 2011	48
Tabel 4.8 Upah Pekerja Pertanian Provinsi Sumatera Barat, 1998 – 2011	50
Tabel 4.9 Lahan Sawah dan Bukan Sawah di Sumatera Barat, 1998 – 2011 ...	52
Tabel 5.1 Hasil Perhitungan Uji Autokorelasi.....	55
Tabel 5.2 Hasil Perhitungan Uji Multikolinearitas.....	56
Tabel 5.3 Hasil Perhitungan Nilai F-tes.....	58
Tabel 5.4 Hasil Perhitungan Nilai T-tes	59
Tabel 5.5 Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Determinasi	60

DAFTAR GAMBAR

Grafik 4.1	Jumlah Penduduk Sumatera Barat.....	41
Grafik 4.2	Jumlah Angkatan Kerja Sumatera Barat.....	46
Grafik 4.3	Jumlah Tenaga Kerja Pertanian Sumatera Barat.....	47
Grafik 4.4	Jumlah Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Sumatera Barat.	49
Grafik 4.5	Upah Pekerja Pertanian Sumatera Barat.....	51
Gambar 5.1	Scatterplot.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Mentah Variabel Yang Diteliti

Lampiran 2 Data Logaritma Investasi Pemerintah, Upah Pekerja Pertanian, dan
Luas Lahan

Lampiran 3 Hasil Regresi



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pertanian memiliki fungsi dan peran strategis bagi masyarakat dan pemerintah. Sektor pertanian berperan diantaranya melalui penyerapan tenaga kerja, penghasil devisa dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyedia kebutuhan pokok dan sebagai jalur utama perekonomian pedesaan. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian (Mulyarto, 1986).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga konstan pada tahun 2011 adalah sebesar 41,27 triliun rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 2,41 triliun rupiah dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun 2010 yang mencapai 38,86 triliun rupiah.

Sumatera Barat yang merupakan wilayah agraris memposisikan sektor pertanian sebagai sektor ekonomi andalan dengan nilai tambah sekitar 320,74 miliar rupiah pada tahun 2010 dan sebesar 320,4 miliar pada tahun 2011. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa struktur perekonomian di Sumatera Barat belum terjadi pergeseran. Hal itu tergambar dari komposisi dan peranan yang diberikan masing-masing sektor ekonomi yang tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun. Dimana sektor pertanian masih menjadi kontributor terbesar dari kegiatan perekonomian di Sumatera Barat.

Sektor pertanian masih menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Sumatera Barat. Tahun 2010 mencapai 22,50 persen sedikit mengalami penurunan 1,42 persen dibandingkan tahun 2009 yakni sebesar 23,92 persen. Pada tahun 2011 kembali terjadi kenaikan sebesar 0,46 persen dibandingkan dengan kontribusi tahun sebelumnya.

Dilihat dari laju laju pertumbuhan sektor pertanian, selama tiga tahun terakhir pertumbuhan PDRB sektor pertanian Sumatera Barat terus meningkat. Pada tahun 2010 sektor pertanian hanya mampu tumbuh sebesar 3,52 persen, meningkat 0,05 dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Tahun 2011 pertumbuhan PDRB sektor pertanian mencapai 4,78 persen, meningkat 1,26 persen dari tahun 2010.

Struktur ekonomi Sumatera Barat yang masih didominasi oleh sektor pertanian juga diperlihatkan dengan masih banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Lebih kurang separuh dari angkatan kerja bekerja pada sektor pertanian, meskipun selama tiga tahun terakhir jumlah tenaga kerja sektor pertanian terus menurun. Pada tahun 2009 jumlah angkatan kerja Sumatera Barat adalah 2.171.002 jiwa, 41,7 persen dari angkatan kerja bekerja pada sektor pertanian yaitu sebanyak 907.256 jiwa. Pada tahun 2010 dan 2011 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian terus menurun. pada tahun 2011 dengan angkatan kerja sebanyak 2.213.513 jiwa, 36,6 persen dari jumlah angkatan kerja bekerja pada sektor pertanian.

Sebagai tulang punggung perekonomian, sektor pertanian diharapkan dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan PDRB Sumatera Barat. Untuk itu dibutuhkan perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian ini.

Pemerintah terus mengupayakan usaha-usaha dalam penciptaan kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan amanat yang telah diembankan oleh rakyat. Di dalam rangka mencapai sasaran tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya pengembangan di segala bidang. Oleh karena itu, tentu saja pemerintah melakukan sumber pembiayaan dana untuk membiayai pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan dapat digali dari sumber dalam negeri dan luar negeri.

Pengeluaran pemerintah sebagai bentuk investasi melalui pembentukan modal akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Investasi diperlukan untuk meningkatkan kegiatan proses produksi termasuk produktivitasnya maupun distribusi input dan output suatu sektor tertentu. Melalui investasi, kapasitas produksi dan outputnya dapat ditingkatkan, yang kemudian bisa menjadi sumber pendapatan bagi tenaga kerja yang bekerja pada sektor tersebut.

Menurut Elfindri (2008), dalam memahami persoalan kebijakan pembangunan di bidang pertanian, sektor rill, literatur yang digunakan adalah perdebatan antara *demand side financing* dan *supply side financing*.

Perdebatan persoalan kebijakan adalah seputar apakah diperlukan penyediaan pendanaan dilakukan oleh pemerintah, lembaga penyedia atau sektor pertanian cukup dibiayai secara mandiri atau *self financing*.

Supply side financing menjelaskan bahwa sektor pertanian memerlukan pembiayaan, lebih-lebih di negara berkembang, mengingat skala usaha relatif kecil, sektor pertanian adalah dikelola dengan *time lag*, atau selang waktu antara musim tanam dengan musim panen. Sehingga tidaklah mengherankan pembiayaan sektor pertanian dapat mengatasi siklus musim sesuai dengan jenis komoditas yang dipilih oleh petani. Pemerintah perlu menyediakan sumber pembiayaan murah alias bersubsidi. Sehingga beban yang ditanggung oleh petani sebagai akibat kerugian adalah relatif kecil.

Mengingat keterbatasan pada SDM pada kalangan petani, dan sebagian diantaranya masih diperlukan adanya proteksi. Maka potensi penyediaan pendanaan yang berasal dari masyarakat pertanian, dan seberapa efektif *self reliance* alias berusaha mandiri pada kalangan masyarakat pertanian dianggap tidak akan berkembang dan tak mungkin dibiarkan begitu saja. Sehingga dalam penyelenggaraan program yang berkembang selama ini, pendekatan *supply side*, penyediaan program pendanaan dari pemerintah masih dijadikan dasar kenapa pemerintah perlu membiayai sektor rill, dalam hal ini sektor pertanian.

Lahan sebagai faktor produksi utama pertanian selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Penggunaan lahan yang semakin meningkat oleh manusia, seperti untuk tempat tinggal, tempat melakukan usaha, pemenuhan akses umum dan fasilitas lain akan menyebabkan lahan pertanian yang tersedia semakin menyempit.

Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali apabila tidak ditanggulangi dapat mendatangkan permasalahan yang serius, antara lain dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan (Iqbal dan Sumaryanto, 2007). Kecenderungan terus meningkatnya kebutuhan akan lahan ini menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit untuk dihindari.

Menurut Elizabeth (2000), masyarakat pertanian di pedesaan pada umumnya masih tergolong miskin dan mayoritasnya mengandalkan tenaga kerja sebagai sumberdaya utama proses produksi. Aspek ketenagakerjaan diharapkan dapat memberi peluang bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya, terutama para buruh tani. Tekanan ekonomi kapitalis ke pedesaan berupa penerapan teknologi modern dan sistem pasar serta perubahan nilai ekonomi mengakibatkan tingginya tingkat konversi tanah dari pertanian ke non-pertanian. Akibatnya, adalah hilangnya kesempatan kerja bagi sebagian besar buruh tani.

Aspek ketenagakerjaan di wilayah pedesaan umumnya dilakukan dengan hubungan yang bersifat bebas, antara lain sistem hubungan kerja dengan upah harian lepas, dengan upah borongan, dan sistem persenan. Peran pemerintah desa relatif kecil (bahkan tidak ada) dalam menentukan tingkat upah. Bagi rumahtangga buruh tani, sumber pendapatan dari kegiatan berburuh, khususnya berburuh tani, memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian rumahtangga. Para buruh tani sebagai pihak penyedia tenaga kerja, dengan adanya hubungan kerja yang disepakati merupakan jaminan tersedianya kesempatan kerja, dalam arti mendapat kemudahan dalam mencari pekerjaan.

Menurut Simajuntak (1999), tenaga kerja dapat menjadi suatu masalah apabila tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai sehingga memperbesar tingkat pengangguran. Oleh sebab itu untuk menghindari permasalahan tersebut dibutuhkan perencanaan tenaga kerja yang matang. Perencanaan tenaga kerja merupakan posisi sentral dalam pembangunan ekonomi atau dapat dikatakan permintaan dan penawaran tenaga kerja mengalami keseimbangan. Permintaan tenaga kerja tergantung kepada tingkat produksi yang dihasilkan serta upah yang diberikan kepada pekerja.

Terjadinya transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya terutama pada tenaga kerja terdidik dan usia muda merupakan masalah yang terjadi dari sisi tenaga kerja sektor pertanian, dimana terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sedangkan pada sektor ekonomi lainnya terjadi peningkatan. Tentunya kejadian ini menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dimasa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Luas Lahan dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Sektor Pertanian di Sumatera Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Investasi memiliki hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi, terlebih jenis investasi yang menyangkut pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hubungan investasi dengan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten, bisa positif atau negatif. Sifat dari dampak pengeluaran pemerintah suatu daerah akan tergantung pada kondisi daerah tersebut.

Secara teoritis investasi pada suatu sektor akan berdampak pada pertumbuhan sektor tersebut. Rendahnya investasi di sektor pertanian menyebabkan rendahnya pertumbuhan di sektor pertanian. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian juga berhubungan dengan rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian dan kontribusinya terhadap PDRB merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius mengingat pentingnya sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian negara.

Investasi sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maupun perluasan lapangan pekerjaan, yang dapat banyak menyerap tenaga kerja sehingga dapat menekan jumlah pengangguran. Dampak dari rendahnya investasi di sektor pertanian juga berdampak pada hasil produksi pertanian.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, dari sisi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam menyerap tenaga kerja. Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja yang berlimpah merupakan keunggulan yang dapat digunakan untuk memacu sektor perekonomian khususnya pertanian.

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, memunculkan pertanyaan?

1. Bagaimana tingkat penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera Barat ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyerapan tenaga sektor pertanian di Sumatera Barat?
3. Implikasi kebijakan apa yang dibutuhkan untuk mendukung penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah

1. Melihat tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Sumatera Barat.
3. Menemukan kebijakan yang tepat dalam mendukung penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja dengan latar belakang apapun baik dari kalangan pemerintahan, pengusaha, maupun masyarakat yang memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan sektor pertanian di Sumatera Barat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi cakupan analisisnya hanya pada keterkaitan antara investasi pertanian, tenaga kerja pertanian dan bagaimana variabel-variabel yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang mengenai pertumbuhan output sektor pertanian di Sumatera Barat, penyerapan tenaga kerja, pengeluaran pemerintah sebagai bentuk investasi pada sektor pertanian dan beserta masalahnya. Bab ini juga menjelaskan, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan-landasan teori yang menjadi dasar dan digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini yaitu teori-teori yang relevan dan mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini antara lain teori pengeluaran pemerintah, teori permintaan tenaga kerja, teori upah dan luas lahan. Dalam bab ini juga tercantumkan penelitian terdahulu yang merupakan penelitian yang menjadi dasar pengembangan bagi penulisan penelitian ini. Dalam bab ini juga terdapat teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisikan dekripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional. Pada studi ini digunakan dengan menggunakan data sekunder bentuk time series secara regional dari tahun 1998-2011 (14 tahun). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), website resmi Departemen Keuangan RI. Metode analisis dalam penelitian ini adalah secara deskriptif dan kuantitatif. Metode analisis kuantitatif menggunakan pendekatan model analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis model*) dengan menggunakan persamaan kuadrat terkecil (*ordinary least square*).

Bab IV : Gambaran Umum

Pada bab ini akan digambarkan secara singkat keadaan perkembangan tenaga kerja sektor pertanian, pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, upah pekerja pertanian, dan luas lahan pertanian di Sumatera Barat.

Bab V: Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil dan pembahasan analisis data yang menjelaskan hasil estimasi dari penelitian yang dilakukan.

Bab VI : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Berdasarkan BPS, pekerja atau tenaga kerja adalah semua orang yang biasanya bekerja di perusahaan/usaha tersebut, baik berkaitan dengan produksi maupun administrasi. Sedangkan menurut Dumairy tenaga kerja adalah penduduk yang berumur pada batas usia kerja, dimana batas usia kerja setiap negara berbeda-beda (Dumairy, 1996)

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Di Indonesia dipilih batas umur minimal 15 tahun tanpa batas maksimum. Pemilihan batas umur 15 tahun berdasarkan kenyataan bahwa pada umur tersebut sudah banyak penduduk yang bekerja karena sulitnya ekonomi keluarga mereka. Indonesia tidak menganut batas umur maksimal karena Indonesia belum memiliki jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang memiliki tunjangan di hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta. Untuk golongan inipun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu mereka yang telah mencapai usia pensiun biasanya tetap masih harus bekerja sehingga mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja (Simajuntak,1985).

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja atau labour force terdiri dari :

- a. Golongan yang bekerja
- b. Golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan

Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari :

- a. Golongan yang bersekolah
- b. Golongan yang mengurus rumah tangga
- c. Golongan-golongan lain atau penerima pendapatan

Ketika golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering dinamakan potensial labour force (Simajuntak, 1985).

2.1.1.1 Teori Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*). Artinya permintaan terhadap TK terjadi bila ada permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan masyarakat meningkat. Bila tidak, maka permintaan terhadap TK tidak akan ada. Permintaan terhadap tenaga kerja ini dapat diturunkan dari fungsi produksi. Ada beberapa fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh para ahli, namun yang paling banyak digunakan adalah fungsi produksi Cobb-Douglas (Elfindri,2004)

$$Q=AK^{\alpha}L^{\beta} \text{-----}(1.1)$$

Dimana, Q adalah output, A adalah perkembangan teknologi, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, serta α dan β adalah elastisitas modal dan elastisitas tenaga kerja.

Turunan pertama (first order condition) terhadap fungsi produksi Cobb-Douglas terhadap modal (K) dan tenaga kerja (L) yang memperlihatkan Produktifitas Marginal Modal dan Produktifitas Marginal Tenaga Kerja (MPL).

$$\partial Q/\partial K = \alpha AK^{\alpha-1}L^{\beta} = 0 \text{ atau } \alpha (Q/K) = 0$$

$$\partial Q/\partial L = \alpha AK^{\alpha}L^{\beta-1} = 0 \text{ atau } \beta (Q/L) = 0$$

$$MRTSK,L = \frac{\partial Q/\partial L}{\partial Q/\partial K} = \frac{\beta K}{\alpha L}$$

MRTSK,L, ini mengukur tingkat substitusi antara K dan L supaya output yang dihasilkan dapat dipertahankan pada tingkat yang sama. Dengan asumsi hanya input modal dan tenaga kerja saja yang digunakan dalam proses produksi, maka tingkat substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) ini dapat digambarkan dalam kurva Isoquant. Dimana pergeseran IQ ke kanan memperlihatkan peningkatan output. Sebaliknya bila bergeser ke kiri memperlihatkan penurunan output yang dihasilkan.

Dalam teori perilaku produsen, pengusaha dihadapkan kepada persoalan terbatasnya biaya produksi. Bila hanya K dan L yang digunakan dalam proses produksi, maka fungsi ongkos ini dapat ditulis :

$$C = rK + wL$$

Dalam teori produksi, kendala ongkos ini disebut Isocost, yaitu garis yang memperlihatkan kombinasi penggunaan K dan L dari sejumlah ongkos tertentu. Peningkatan ongkos akan menggeser Isocost kekanan dan sebaliknya bila ongkos menurun.

Apabila didefinisikan bahwa keuntungan merupakan nilai output dikurangi dengan total biaya input peubah, maka fungsi keuntungan produsen dapat ditulis sebagai berikut :

$$\pi = pQ - \sum_{i=1}^n C_i X_i \text{-----(1.2)}$$

$$= pAK^\alpha L^\beta - C_1 K_1 - C_2 L_2 \text{-----(1.2a)}$$

Dimana, π adalah keuntungan, p adalah harga output per unit dan C_1 adalah harga input peubah i per unit.

Keuntungan maksimum tercapai pada saat harga sama dengan biaya marginal ($P=MC$). Untuk fungsi Cobb-Douglas di atas diasumsikan keadaan tersebut dipenuhi pada saat $\alpha + \beta < 0$. Turunan pertama dari fungsi keuntungan adalah :

$$\frac{\partial \pi}{\partial K} = \alpha p A K^{\alpha-1} L^\beta - C_K = 0 \text{-----(1.3)}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial L} = \alpha p A K^\alpha L^{\beta-1} - C_L = 0 \text{-----(1.4)}$$

Permintaan input untuk K dan L dapat dihitung dengan menyelesaikan kondisi turunan pertama keseimbangan (3) dan (4). Dari keseimbangan (3) fungsi permintaan input untuk K adalah :

$$K^{\alpha-1} = C_K (\alpha p A)^{-1} L^{-\beta} \text{-----(1.5)}$$

$$K = C_K^{1/(\alpha-1)} (\alpha p A)^{-1/(\alpha-1)} L^{-\beta/(\alpha-1)} \text{-----(1.6)}$$

Berdasarkan keseimbangan (6) permintaan input untuk K merupakan fungsi dari harga input itu sendiri (C_K), harga output (p) dan jumlah input lainnya (L). Secara matematis fungsi permintaan input K dapat ditulis :

$$K = f(C_K, p, L) \text{-----}(1.7)$$

Dan dari keseimbangan (4) fungsi permintaan input untuk L adalah :

$$L^{\beta-1} = C_L (\beta p A)^{-1} K^{-\alpha} \text{-----}(1.8)$$

$$L = C_L^{1/(\beta-1)} (\beta p A)^{-1/(\beta-1)} K^{-\alpha/(\beta-1)} \text{-----}(1.9)$$

Dari keseimbangan (9) permintaan input untuk L merupakan fungsi dari harga input itu sendiri (C_L), harga output (p) dan jumlah input lainnya (K), yang secara matematis dapat ditulis :

$$L = f(C_L, p, K) \text{-----}(1.10)$$

Berdasarkan turunan turunan diatas dapat disimpulkan bahwa permintaan input dalam suatu proses produksi tergantung pada sejumlah faktor yaitu harga input, harga output dari barang yang dihasilkan dan jumlah input lainnya yang digunakan dalam proses produksi.

Dalam pembentukan model pada penelitian ini yang digunakan sebagai harga input dari permintaan tenaga kerja adalah variabel upah pekerja pertanian. Sedangkan yang dianggap sebagai jumlah input lainnya adalah variabel pengeluaran pemerintah dan luas lahan.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Arifin dan Gina (2009) dalam bukunya menyatakan pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah dalam mengelola dan mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik. Caranya adalah dengan mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan fiskal dikenal juga dengan istilah lain yakni kebijakan anggaran.

Kebijakan anggaran terbagi atas 2 bagian, yaitu kebijakan anggaran berimbang dan kebijakan anggaran tidak berimbang. Kebijakan anggaran berimbang adalah kebijakan anggaran dimana penerimaan pemerintah sama besarnya dengan pengeluaran pemerintah. Bila terjadi perubahan pada salah satu sisi maka sisi yang lain akan menyesuaikan yang besarnya sama dengan perubahan yang terjadi. Sedangkan kebijakan anggaran tidak berimbang adalah kebijakan anggaran dimana besarnya penerimaan tidak sama dengan besarnya pengeluaran.

Dalam kebijakan anggaran tidak berimbang dikenal 2 istilah yaitu anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit adalah situasi dimana pengeluaran melebihi penerimaan. Kebijakan anggaran defisit dapat ditempuh guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah mempengaruhi permintaan agregat dan lapangan kerja suatu perekonomian.

Sebaliknya anggaran surplus terjadi jika seluruh penerimaan pajak dan penerimaan lainnya melebihi pengeluaran. Kebijakan surplus anggaran dilakukan jika perekonomian sedang berada pada tahap ekspansi dan terus memanas sehingga mengakibatkan inflasi terus meningkat. Melalui anggaran surplus, pemerintah akan menghemat pengeluaran untuk mengurangi permintaan sehingga daya beli masyarakat menurun melalui cara menaikkan pajak.

2.1.2.1 Hukum Adolf Wagner

Mangkoesebroto dalam Bastias (2010) memaparkan bahwa hukum Adolf Wagner menyatakan pengeluaran pemerintah semakin lama semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh makin meningkatnya peranan pemerintah dalam perekonomian, jadi, semakin besar campur tangan pemerintah, maka pengeluaran

pemerintah pun akan semakin meningkat. Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan "*The Law of Expanding State Expenditure*".

Dalam teori ini, Wagner melakukan pengamatan terhadap Negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 yang menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional.

Hukum Wagner ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{P_kPP_1}{PPK_1} < \frac{P_kPP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_kPP_n}{PPK_n}$$

Dimana :

P_kPP : pengeluaran pemerintah perkapita

PPK : pendapatan perkapita yaitu GDP/jumlah pendapatan

1,2,...,n : jangka waktu (tahun)

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yakni tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, tingkat urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

2.1.2.2 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari berbagai segi sehingga menjadi dapat dibedakan atas beberapa kelompok (Suparmoko, 2000) :

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.

2. Pengeluaran langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Berdasarkan atas penilaian tersebut, maka pengeluaran Negara dapat dibedakan atas beberapa jenis, yakni :

1. Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima barang dan jasa yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa untuk perusahaan Negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya pengeluaran yang mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akan meningkatkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat (*public health*).
3. Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak reproduktif, yakni pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya pengeluaran untuk bidang rekreasi, pendirian monument, objek-objek wisata, dan lain sebagainya.

4. Pengeluaran yang secara langsung tidak reproduktif dan merupakan pengeluaran yang memboroskan, misalnya untuk pembiayaan pertahanan / perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang meningkat bagi orang yang menerimanya.
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak segera dijalankan kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.

Di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan atas 2 bagian yakni : pengeluaran aparatur dan pengeluaran public (Dumairy, 2001)

- **Pengeluaran Aparatur**

Yakni pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintah sehari-hari, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga), angsuran dan bunga utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lainnya. Angsuran belanja aparatur memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme system pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas, yang pada gilirannya akan mendorong tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

- **Pengeluaran public,**

yakni pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasaranan fisik maupun non fisik. Pengeluaran ini merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai

program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Adapun dana tersebut kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

Sementara itu, ada tiga pos utama pada sisi pengeluaran (Boediono, 1999)

yakni :

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai.
- c. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer (transfer payment), yaitu pembayaran pemerintah kepada individu yang tidak dipakai untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai imbalannya.

2.1.3 Konsep dan Teori Tingkat Upah

Dalam teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha (Sukirno, 2005).

Adapun pengertian upah dalam ekonomi sumber daya manusia adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya (Ananta, 1990).

2.1.3.1 Jenis Upah

Menurut Sumarsono (2003) upah dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Upah Pokok

Upah yang diberikan kepada karyawan yang dibedakan atas upah per jam, per hari, per minggu, per bulan.

2. Upah lembur

Upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan perusahaan.

3. Tunjangan

Sejumlah uang yang diterima karyawan secara menyeluruh karena adanya keuntungan dari perusahaan pada akhir tahun neraca.

Menurut Kartasapoetra (1992), jenis-jenis upah dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Upah Nominal (Upah Uang)

Upah nominal adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada para pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran terhadap tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah uang disebut demikian karena seluruh nilai imbalan jasa atau kerjanya, sepenuhnya diterimakan dalam bentuk uang kontan.

2. Upah Nyata (Upah Rill)

Upah nyata adalah tingkat upah pekerja dengan diukur kemampuan daya belinya terhadap barang-barang dan atau jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Jadi dalam hal ini akan banyak tergantung dari :

- a. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima,
- b. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

3. Upah Hidup (*living wages*)

Upah hidup yaitu bilamana upah yang diterima oleh seseorang pekerja relatif dirasakan cukup selain untuk membiayai barang-barang kebutuhan pokok hidupnya, cukup pula untuk membiayai sebagian kebutuhan sosial keluarganya, seperti biaya pendidikan dan pangan yang bergizi, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya.

4. Upah Terendah

Upah terendah yang telah diperhitungkan sebagai dasar pemberian upah yang seharusnya dapat mencukupi untuk digunakan sebagai biaya kelangsungan hidup pekerja itu beserta keluarganya, sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Jadi dalam penentuan upah pihak pengusaha harus mempertimbangkan *the cost of living*. Tujuan utama pengadaan upah minimum ialah :

- a. Menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh) sebagai sub sistem yang kreatif dalam suatu sistem kerja.
- b. Melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang keadaannya secara material kurang memuaskan.
- c. Mendorong kemungkinan diberikannya dengan nilai pekerjaan yang dilakukan setiap pekerja.

- d. Mengusahakan terjaminnya ketenangan atau kedamaian dalam organisasi kerja atau perusahaan.
- e. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidupnya secara normal.

5. Upah Wajar (*Fair Wages*)

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar atau layak diberikan kepada para pekerja, sebagai imbalan atas usaha atau kegiatan-kegiatan kerjanya, untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya disamping pangan beserta keluarganya. Upah ini tentunya demikian bervariasi dengan bergerak antara upah minimum dan upah hidup (*living wages*).

2.1.4 Konsep dan Defenisi Lahan

Penduduk yang bertambah banyak secara otomatis akan membutuhkan lahan yang semakin meningkat, akan tetapi lahan sifatnya terbatas yakni tidak bertambah atau pun berkurang. Kebutuhan akan lahan sangatlah penting bagi setiap makhluk hidup karena lahan merupakan bagian dari permukaan bumi yang mempunyai karakter dan fungsi luas dengan berbagai macam kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Sedangkan menurut Bintarto (1977) berpendapat lahan dapat diartikan sebagai land settlement yaitu suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, dimana mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan hidupnya.

2.1.4.1 Penggunaan Lahan

Menurut Arsyad (1998) mengemukakan bahwa penggunaan lahan adalah suatu bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual.

Selain itu juga Sitorus (1989) mengatakan bahwa pemanfaatan penggunaan lahan dapat dikelompokkan secara umum menjadi beberapa bagian yaitu : (1) Penggunaan lahan pedesaan dalam artian termasuk pertanian, kehutanan, cagar alam, dan tempat-tempat rekreasi. (2) Penggunaan lahan perkotaan dan industri termasuk kota dan kompleks industri, jalan raya, dan pertambangan. Penggunaan lahan perkotaan dan kawasan industri serta jaringan jalan pada dasarnya berpengaruh terhadap nilai ekonomis penggunaan lahan pertanian.

Menurut Sandy (1985) berpendapat bahwa pemanfaatan lahan pertanian dikelompokkan ke dalam beberapa macam, yaitu :

1. Pekarangan, merupakan sebuah lahan kosong yang biasanya ada di depan rumah dan biasanya ditanami berbagai tanaman seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya.
2. Sawah, dibuat dengan tujuan terutama untuk tanaman padi, akan tetapi dalam kenyataannya sehari-hari sawah sering juga ditanami secara bergiliran dengan palawija dan lain-lain.
3. Ladang berpindah, biasanya terjadi ladang berpindah adalah di daerah yang mempunyai penduduk yang jarang. Pola penggunaan lahan di daerah yang masyarakatnya masih mempunyai tradisi

perladangan berpindah biasanya sesuai dengan pola lingkaran konsentrasinya Von Thunen.

4. Kebun campuran adalah jenis pemanfaatan yang sebenarnya kurang intensif, meskipun jumlah tanaman di atas lahan yang sebenarnya banyak.
5. Tegalan adalah jenis pemanfaatan lahan kering yang cukup intensif. Tegalan biasanya ditanami tanaman musiman dan biasanya terdapat di daerah penduduk yang cukup padat
6. Perkebunan, usaha dibidang perkebunan dapat dilihat dari beberapa segi. Kalau dilihat dari segi usahanya yaitu seperti perkebunan rakyat dan perkebunan negara.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Syam, *et al* (2000) yang berjudul Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Penyediaan Lapangan Kerja dan Perbandingannya dengan Sektor-Sektor lain. Penelitian ini bertujuan melihat kemampuan penyerapan tenaga kerja dari setiap sektor dan membandingkan kemampuan dari setiap sektor tersebut. Hasil dari penelitian ini penyerapan tenaga kerja pada tahun 1985-1989 didominasi oleh sektor pertanian yang mana mampu menyerap tenaga kerja sebesar 56.66 persen, dibandingkan dengan sektor lain yang hanya mampu menyerap 5 – 13 persen tenaga kerja dari jumlah keseluruhan angkatan kerja. Dalam jangka pendek tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan perdagangan relatif lebih stabil dibandingkan sektor pertanian, namun pada jangka panjang sektor pertanian lebih stabil dibanding dengan sektor perdagangan dan industri.

Penelitian Rusastra, *et al* (2004) mengenai Ekonomi Tenaga Kerja Pertanian dan Implikasinya dalam Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Buruh Tani. Memberikan hasil kesempatan kerja sektor pertanian periode 1995 – 2000 meningkat 0,51%/tahun. Pada tahun 2000, posisinya tetap dominan (45,28%) dengan status pekerjaan berburuh tani meliuti 5,38 juta orang. Penelitian ini membahas perkembangan struktur kesempatan kerja dan tingkat upah serta dampaknya terhadap produksi padi, struktur pendapatan, dan tingkat kesejahteraan petani dan buruh tani di pedesaan.

Terdapat indikasi kelangkaan tenaga kerja dan kenaikan tingkat upah absolut, namun kenaikan upah riil berjalan lambat. Elastisitas tenaga kerja terhadap produktivitas relatif tinggi (0,13) dan tingkat upah berdampak negatif inelastis terhadap penawaran dan keuntungan usaha tani padi. Sumber pendapatan dominan rumah tangga buruh tani adalah kegiatan berburuh dan non pertanian dengan proporsi 68,10%.

Implikasinya adalah kelangkaan dan kenaikan tingkat upah perlu dikendalikan dan perbaikan kesejahteraan buruh tani perlu dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan dikendalikan komprehensif. Produktivitas dan kesejahteraan buruh tani dapat ditingkatkan melalui pengembangan kelembagaan mekanisasi pertanian, agrobisnis dan agroindustri, serta perluasan kesempatan kerja di luar sektor pertanian.

Penelitian Handari, D.A.M. (2000), yang berjudul Dampak Investasi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian di Indonesia, yang menggunakan Analisis Input-Output sisi Permintaan sebagai alat analisisnya, menghasilkan bahwa peranan sektor pertanian di Indonesia cukup besar. Hal ini dapat dilihat

dari kontribusinya terhadap pembentukan struktur permintaan dan penawaran (13.60% dan 7.81%), struktur konsumsi masyarakat (13.08%), struktur investasi (0.30 %) dan perubahan stok (9.46%), struktur ekspor (2.98%) dan impor (4.63 %) dan struktur nilai tambah bruto (16.81 %).

Priyarsono, *et.al* (2006) yang berjudul Peranan Pertanian dalam Mengatasi Masalah Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketahanan Pangan. Hasil dari penelitian menyebutkan investasi untuk peningkatan output sektor pertanian memiliki dampak yang lebih besar terhadap faktor produksi tenaga kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Persentase penyerapan tenaga kerja terbesar untuk sektor pertanian terdapat pada sektor tanaman pangan (12.23%).

Yennetri (1998) yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja dan Transformasi Tenaga Kerja Dari Sektor Pertanian ke Sektor Non Pertanian di Sumatera Barat. Hasil dari penelitian menyebutkan model kesempatan kerja sektor pertanian diduga sebagai fungsi dari rata-rata upah rill, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), luas areal tanaman, jumlah traktor, populasi ternak potong, populasi sapi perah, luas perkebunan negara, luas perkebunan besar swasta, luas usaha perikanan budidaya, investasi/pengeluaran pembangunan untuk sektor pertanian dan kesempatan kerja sektor pertanian tahun sebelumnya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perekonomian Sumatera Barat masih bertumpu pada sektor pertanian. Sebagian besar penduduk yang termasuk angkatan kerja bekerja pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Secara keseluruhan laju pertumbuhan kesempatan kerja belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja. Jika dilihat dari sektor ekonomi,

secara rata-rata struktur kesempatan kerja di sektor pertanian lebih tinggi daripada sektor ekonomi lainnya, walaupun mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Sementara itu kesempatan kerja pada sektor non pertanian dan industri mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas maka hipotesa yang akan dikembangkan sebagai berikut :

1. Diduga pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera Barat.
2. Diduga luas lahan pertanian mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera Barat.
3. Diduga upah pekerja pertanian mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera Barat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder bentuk (time series) secara regional dari tahun 1998-2011. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan website resmi Departemen Keuangan RI. Data yang digunakan diantaranya :

- Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama sebagai data tenaga kerja pertanian.
- Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian sebagai data pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian.
- Rata-rata upah / gaji / pendapatan bersih selama sebulan buruh / karyawan / pegawai dan pekerja Sumatera Barat sebagai data upah pekerja sektor pertanian.
- Luas lahan pertanian.

3.2 Pembentukan Model

Dalam penelitian ini penulis menggunakan faktor-faktor tersebut untuk melihat pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja, maka model persamaannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y_t = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Dimana :

Y_t = Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

B_0 = Koefisien konstanta

X_1 = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian

X_2 = Upah Pekerja Pertanian

X_3 = Luas Lahan Pertanian

B_1, B_2, B_3 = Koefisien Regresi

e = Error

3.3 Identifikasi Variabel

1. Variabel bebas atau Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah variabel yang dapat berubah dengan tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain atau variabel-variabel yang berfungsi sebagai peubah (yang dipengaruhi). Dalam pembahasan ini yang menjadi variabel bebas (independent variabel) adalah pengeluaran pemerintah sektor pertanian, output sektor pertanian, dan upah tenaga kerja sektor pertanian.

2. Variabel terikat atau Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dapat berubah dengan dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas (variabel terpengaruh). Sedangkan yang menjadi variabel tidak bebas (dependent variabel) dalam pembahasan ini adalah penyerapan tenaga kerja.

3.4 Metode Pengolahan dan Analiss Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif dan kuantitatif. Metode analisis kuantitatif menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regresion analysis model*) dengan menggunakan persamaan kuadrat terkecil (*ordinary least square*). Unutk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian, upah pekerja pertanian, dan luas lahan pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat.

3.5 Uji Asumsi Klasik

3.5.1 Uji Normalitas

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak.model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Caranya adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi data adalah normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. Adapun cara analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan grafik normal plot, dimana:

1. Jika penyebaran data mengikuti garis normal, maka data berdistribusi normal.
2. Jika penyebaran data tidak mengikuti garis normal, maka data distribusi tidak normal.

3.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolinearitas diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dalam penelitian ini, dapat diketahui dengan cara melihat nilai inflation factor (VIF). Operasionalnya, setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan di regresi terhadap variabel independen lainnya

Uji Regresi dikatakan terbebas dari multikolinearitas jika nilai *Variance Inflation Tolerance* (VIF), tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 (Ghozali, 2005).

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan salah satu asumsi mengenai faktor gangguan (disturbance term) U_i adalah mempunyai varian yang sama untuk keseluruhan pengamatan atas X , yaitu semua faktor gangguan mempunyai varian yang sama untuk seluruh nilai-nilai variabel bebas (Sofyardi, 2010). Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan uji scatterplot. Uji grafik dilakukan dengan membaca pola Scatterplot.

Apabila titik-titik membentuk pola tertentu Scatterplot, maka dapat disimpulkan terdapat heteroskedastisitas dan model harus diperbaiki.

3.5.4 Uji Autokorelasi

Menurut Gujarati (1999), uji autokorelasi merupakan korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross sectional*). Autokorelasi digunakan apabila data yang digunakan adalah data time series gunanya adalah untuk menguji apakah data sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, berarti ada problema autokorelasi maka solusi dari masalah autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data mengikuti prosedur persamaan perbedaan yang digeneralisasikan. Model yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi. Uji ini memakai rumus Durbin Watson (Gujarati,1999) yaitu :

$$d = \frac{\sum(u_t - u_{t-1})^2}{\sum u_t^2}$$

Dimana :

D = Statisik Durbin Watson

U = Nilai Residual

N = Jumlah Sampel

Nilai d tersebut dapat diklasifikasikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Nilai Teoritik Durbin Watson

No	Nilai d	Keterangan
1	$d < d_L$	Ada autokorelasi positif
2	$d_L < d < d_U$	Tidak ada kesimpulan
3	$d_U < d < 4-d_U$	Tidak ada autokorelasi
4	$4-d_U < d < 4-d_L$	Tidak ada kesimpulan
5	$d > 4-d_L$	Ada autokorelasi negative

Sumber : Gujarati (1999)

3.6 Pengujian Hipotesis Statistik

Uji hipotesis ini berguna untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan atau tidak. Untuk kepentingan tersebut, maka semua koefisien regresi harus diuji. Ada 3 jenis hipotesis yang dapat digunakan untuk menguji koefisien regresi yaitu *uji Koefisien Determinan, uji F, dan uji t*.

3.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk model dengan lebih dari satu variable bebas (explanatory variables), maka korelasi antara variable bebas dengan variable tidak bebas disebut dengan multiple korelasi. Seperti pada model dua variable bebas, koefisien determinasi atau $R^2_{Y.X_1 X_2}$ menunjukkan variasi total Y yang dijelaskan oleh bidang regresi yakni melalui perubahan pada X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 dan X_6 dengan menggunakan model sebagai berikut (Sofyardi, 2010):

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum x_1 y + \beta_2 \sum x_2 y + \beta_3 \sum x_3 y + \beta_4 \sum x_4 y + \beta_5 \sum x_5 y + \beta_6 \sum x_6 y}{\sum y^2}$$

Nilai R^2 terletak antara 0 dan 1. Semakin tinggi R^2 semakin besar persentase variasi Y yang dijelaskan oleh bidang regresi yakni semakin baik “*goodness of fit*” dari bidang regresi terhadap observasi sampel.

3.6.2 Uji F (F-Test)

Hasil uji F digunakan untuk melakukan pengujian parameter secara keseluruhan variabel sekaligus (berganda) sebagai penerang bagi variabel tidak bebas. Secara statistik rumus F-test sebagai berikut (Sofyardi, 2010):

$$F\text{-Test} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Dimana:

R^2 = Koefesien penentu berganda

K = jumlah variabel bebas

N = jumlah observasi

$k-1$ = V1 (degree of freedom numerator)

$n-k$ = V2 (degree of freedom denominator)

Bila nilai F hitung yang diperoleh besar dari F table berarti keseluruhan variabel memang merupakan variabel penerang bagi variabel tidak bebas.

3.6.3 Uji t (t-test)

Pengujian parameter secara individu atau disebut juga dengan uji t (t-test), disini dihitung ratio t untuk tiap β_i .

Menghitung nilai t-statistik (t-hitung) dapat dicari dengan formula berikut (Sofyardi, 2010):

$$t = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)}$$

Dimana:

β_i = parameter yang ditaksir

$se(\beta_i)$ = standar error

Ini adalah nilai yang diobservasi dari ratio t, yang dibandingkan dengan nilai teoritis t yang diperoleh dari t-tabel, dengan n-k degrees of freedom. Secara sederhana pengujian dilakukan sebagai berikut:

- Jika t-hitung < t-tabel artinya hipotesis nol diterima, berarti β_i tidak signifikan secara statistik.
- Jika t-hitung > t-tabel artinya hipotesis nol ditolak, berarti β_i signifikan secara statistik.

Namun pada penelitian skripsi ini t-hitung telah diperoleh secara langsung dari hasil estimasi persamaan regresi dengan olah data menggunakan SPSS. Kriteria pengujian yaitu membandingkan antara nilai t-hitung dengan t-tabelnya. Nilai t-test akan bertanda positif apabila regresi variabel bebas ditemukan positif. Demikian pula sebaliknya, bila regresi variabel bebas ditemukan negatif berarti nilai t-test tentu akan bertanda negatif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Perkembangan PDRB Sektor Pertanian di Sumatera Barat

Perkembangan perekonomian nasional berpengaruh kepada pencapaian laju pertumbuhan daerah. Pada sektor pertanian contohnya, ketika produksi masih rendah Indonesia menjadi negara yang masih mendatangkan berbagai produk pertanian dari negara lain. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan produksi pertanian. Melalui program intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi upaya meningkatkan produksi pertanian telah berhasil tercapai terutama pada terciptanya swasembada beras pada tahun 1984. Setelah peningkatan produksi tercapai, masalah berikutnya adalah bagaimana agar ketersediaan tenaga kerja dan kesejahteraan petani dapat terjamin.

Kondisi perekonomian dapat diukur menurut tiga ukuran, yaitu laju inflasi, laju pertumbuhan output dan tingkat pengangguran. Dari ketiga ukuran tersebut yang lebih populer digunakan sebagai indikator prestasi perekonomian secara makro adalah laju pertumbuhan output atau yang dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto.

Ada dua bentuk penyajian PDRB yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku yaitu jumlah nilai produk atau pendapatan yang diukur atau dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produk dan pendapatan yang dinilai atas dasar harga pada tahun tertentu. PDRB yang disajikan dan digunakan dalam pembahasan ini adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 4.1
PDRB Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Lapangan Usaha 2009 – 2011

No	Lapangan Usaha	2009 (Juta Rupiah)	2010 (Juta Rupiah)	2011 (Juta Rupiah)
1	Pertanain	8.773.503,32	9.094.245,77	9.414.646,38
2	Pertambangan & Penggalian	1.137.763,20	1.203.809,02	1.252.264,21
3	Industri Pengolahan	4.670.605,07	4.787.847,71	5.010.656,26
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	431.225,75	441.350,12	458.428,05
5	Bangunan	1.822.283,08	2.072.420,52	2.261.544,81
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6.707.683,59	6.940.990,93	7.419.227,61
7	Pengangkutan & Komunikasi	5.256.339,28	5.777.504,58	6.293.867,86
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.901.983,36	2.011.441,28	2.110.264,07
9	Jasa-Jasa	5.981.852,02	6.530.577,74	7.005.507,12
Total		36.683.238,68	38.860.187,68	41.276.406,36

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 4.2
Distribusi Persentase PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha
2009 - 2011

No	Lapangan Usaha	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
1	Pertanian	23,92	22,50	22,96
2	Pertambangan dan Penggalian	3,20	3,10	3,02
3	Industri Pengolahan	12,73	12,32	12,13
4	Listrik dan Air	1,18	1,14	1,11
5	Bangunan	4,97	5,33	5,47
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	18,29	17,86	17,97
7	Angkutan dan Komunikasi	14,33	14,84	14,20
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,18	5,17	5,09
9	Jasa-jasa	16,31	16,74	17,04
PDRB		100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik

Meskipun selama tiga tahun terakhir kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Sumatera Barat terus menurun, namun sektor pertanian masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumatera Barat dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2009 adalah 23,92 persen. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB turun menjadi 22,50, pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi 22,96 persen terhadap PDRB Sumatera Barat.

Tabel 4.3
PDRB Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Sub Sektor Pertanian 2009-2011

Sub Sektor	2009 (Juta Rupiah)	2010 (Juta Rupiah)	2011 (Juta Rupiah)
Tanaman Pangan & Hortikultura	4.431.126,73	4.569.189,49	4.755.611,42
Perkebunan	2.177.111,66	2.302.820,11	2.375.331,82
Peternakan	696.369,69	734.091,56	762.770,87
Kehutanan	479.354,84	502.124,78	513.818,73
Perikanan	989.540,40	1.024.188,49	1.071.169,84

Sumber : Badan Pusat Statistik

Bila dilihat per sub sektor, hampir seluruh sub sektor pertanian mengalami kenaikan tiap tahunnya selama tiga tahun terakhir. Sub sektor tanaman pangan dan hortikultura menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB pertanian Sumatera Barat dibandingkan dengan sub sektor lainnya. PDRB untuk sub sektor tanaman pangan dan hortikultura terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 4.755.611,42 juta pada tahun 2011. Sub sektor tanaman perkebunan menempati urutan kedua dalam pembentukan PDRB pertanian Sumatera Barat sebesar 2.375.331,82 juta pada tahun 2011. Sub sektor yang paling rendah memberikan kontribusinya adalah sub sektor kehutanan yang nilainya berkisar antara 479.354,84 juta pada tahun 2009 sampai angka 513.818,73 juta pada tahun 2011. Untuk sub sektor perikanan dan sub sektor

peternakan, masing-masing menempati posisi ketiga dan keempat terbesar secara berturut-turut dalam pembentukan PDRB pertanian Sumatera Barat.

Dalam kurun waktu 14 tahun terakhir setiap tahunnya PDRB sektor pertanian Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian Sumatera Barat terus tumbuh dari tahun ke tahun. PDRB pertanian yang lebih besar dari PDRB pertanian tahun sebelumnya menggambarkan bahwa output sektor pertanian tersebut mengalami peningkatan. Keadaan ini dapat dilihat dari grafik PDRB sektor pertanian berikut.

Tabel 4.4
Jumlah dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Sumatera Barat
Atas Harga Konstan 2000
1998 – 2011

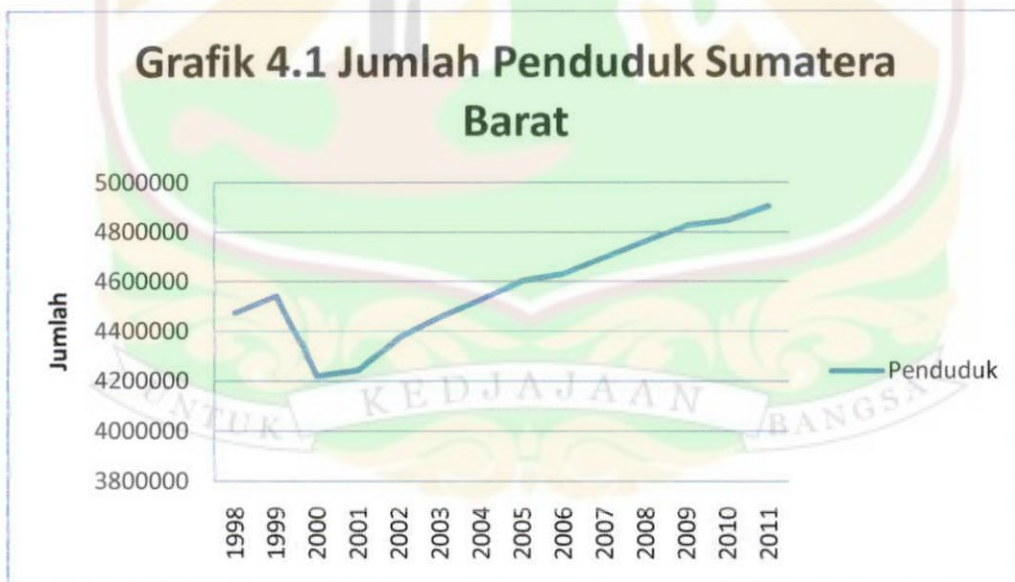
Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1998	5.190.843,27	0.00
1999	5.356.277,59	3.19
2000	5.385.595,71	0.55
2001	5.648.004,31	4.87
2002	6.091.915,61	7.86
2003	6.557.510,72	7.64
2004	6.937.172,92	5.79
2005	7.293.205,65	5.13
2006	7.658.394,83	5.01
2007	8.038.919,12	4.97
2008	8.478.980,94	5.47
2009	8.773.503,32	3.47
2010	9.094.245,77	3.52
2011	9.414.646,38	4.78

Sumber : Badan Pusat Statistik, Diolah

4.2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Sumatera Barat

Masalah kependudukan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian serius dalam proses pembangunan karena masalah ini juga mencakup masalah jumlah, komposisi, distribusi dan pendapatan penduduk.

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali serta dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus dapat menjadi penunjang pembangunan ekonomi apabila digunakan secara maksimal. Sebaliknya, apabila jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali dapat mengakibatkan berbagai persoalan sosial ekonomi yang menghambat pembangunan perekonomian.



Sumber : BPS, Sumatera Barat dalam Angka

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Sumatera Barat, 1998-2011

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1998	4.473.250	-
1999	4.541.970	1.54
2000	4.220.300	-7.08
2001	4.243.520	0.55
2002	4.375.080	3.10
2003	4.456.900	1.87
2004	4.528.242	1.60
2005	4.603.957	1.67
2006	4.632.152	0.61
2007	4.697.764	1.42
2008	4.763.099	1.39
2009	4.827.973	1.36
2010	4.846.909	0.39
2011	4.904.460	1.19

Sumber : BPS, Sumatera Barat dalam Angka

Sejak tahun 1998 hingga 2011 pertumbuhan penduduk Sumatera Barat terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 1998 jumlah penduduk Sumatera Barat 4.473.250 jiwa kemudia meningkat dengan laju pertumbuhan 1,54 persen pada tahun 1999.

Pada tahun 2000 terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 7,08 persen menjadi 4.220.300 jiwa. Hal ini dikarenakan suksesnya program Keluarga Berencana pada tahun tersebut sebagai upaya pemerintah menekan angka kelahiran. Pada tahun berikutnya yaitu 2001 sampai 2011 jumlah penduduk terus meningkat menjadi 4.904.460 jiwa. Salah satu penyebab tingginya pertumbuhan penduduk adalah masih melekatnya budaya “banyak anak banyak rezeki” di dalam masyarakat. Serta masih banyaknya kelahiran pada pasangan usia muda disebahagian daerah terutama di pedesaan.

4.3 Angkatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Sumatera Barat

Konsep tentang penduduk usia kerja yang berlaku di Indonesia diartikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Berdasarkan jumlah kegiatannya, BPS membagi lagi penduduk yang tergolong ke dalam usia kerja ini atas dua bagian yaitu :

1. Angkatan Kerja, dibedakan lagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Bekerja

Berdasarkan pengertian yang diberikan BPS yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam satu minggu yang lalu. Kegiatan tersebut pula kegiatan bekerja yang tidak dibayar yang membantu dalam usaha / kegiatan ekonomi.

b. Mencari Pekerjaan

Mencari kerja adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survey orang tersebut mencari pekerjaan, seperti mereka :

- Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan.
- Yang sudah bekerja, karena suatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Usaha untuk mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan. Jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sedang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bekerja atau mereka yang sedang dibebaskan tugas, baik akan dipanggil kembali maupun tidak, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tidak dapat dianggap sebagai pengangguran terbuka

2. Bukan Angkatan Kerja, dibedakan pula menjadi 3 bagian :

a. Sekolah

Merupakan kegiatan seseorang untuk bersekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebelum seminggu yang lalu sebelum pencacahan.

b. Mengurus Rumah Tangga

Merupakan kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya ibu-ibu rumah tangga dan anak-anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah, walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.

c. Kegiatan Lainnya

Kegiatan seseorang selain yang disebutkan diatas, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu, dsb).

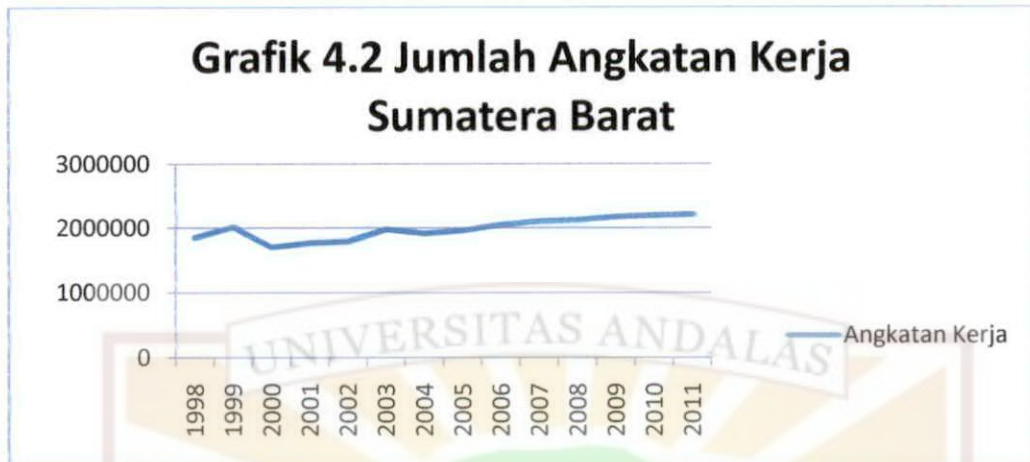
Tabel 4.6
 Jumlah Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja Sektor Pertanian
 Sumatera Barat, 1998-2011

Tahun	Angkatan Kerja (Jiwa)	%	Tenaga Kerja Pertanian (Jiwa)	%
1998	1857150	41.52	916132	49.33
1999	2016250	44.39	972841	48.25
2000	1707770	40.47	841418	49.27
2001	1769290	41.69	877922	49.62
2002	1793720	41.00	902241	50.30
2003	1980880	44.45	1017375	51.36
2004	1916869	42.33	952492	49.69
2005	1963332	42.64	833410	42.45
2006	2051800	44.29	821996	40.06
2007	2106711	44.84	905575	42.99
2008	2127512	44.67	924314	43.45
2009	2172002	44.99	907256	41.77
2010	2194040	45.27	900306	41.03
2011	2213513	45.13	813699	36.76

Sumber : BPS, Sumatera Barat dalam Angka, diolah

Sejak tahun 1998 sampai tahun 2011 jumlah angkatan kerja di Sumatera Barat terus bertambah. Persentase jumlah angkatan kerja tiap tahunnya berkisar pada angka 43 persen dari jumlah penduduk Sumatera Barat.

Pada tahun 1998 jumlah angkatan kerja adalah 1.857.150 jiwa meningkat pada tahun 1999 menjadi 2.016.250 jiwa. Mengalami penurunan pada tahun 2000 menjadi 1.707.770 jiwa. Sejak tahun 2000 sampai 2011 jumlah angkatan kerja terus bertambah, sempat mengalami penurunan hanya satu kali pada tahun 2004. Pada tahun 2011 jumlah angkatan kerja di Sumatera Barat mencapai 2.213.513 jiwa.

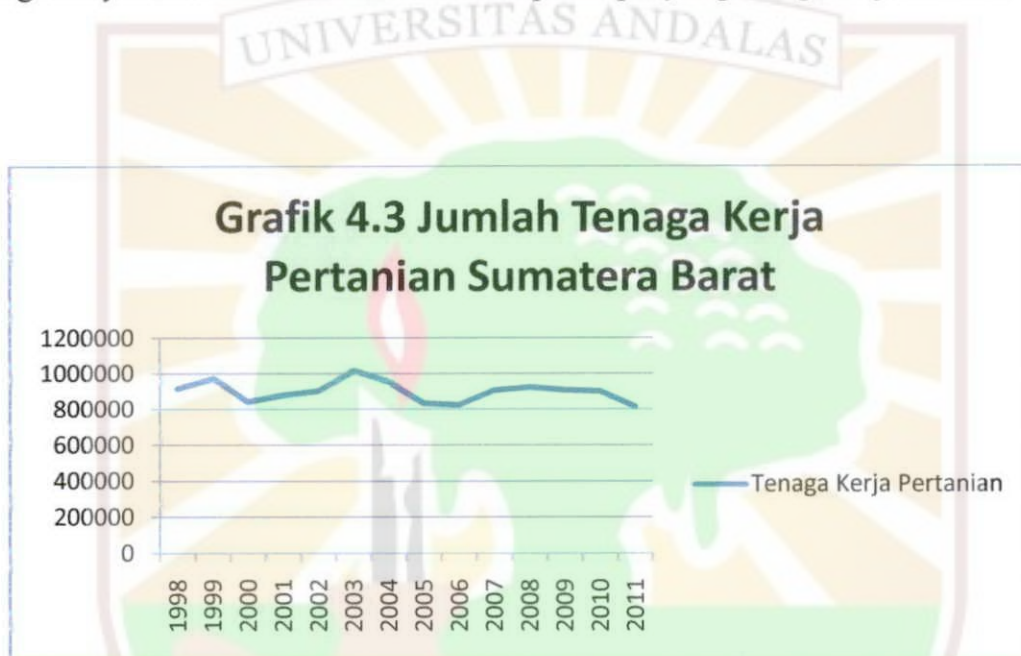


Sumber : BPS, Sumatera Barat dalam Angka

Kesempatan kerja menunjukkan banyaknya lapangan kerja yang terisi oleh angkatan kerja. Lapangan pekerjaan yang tersedia diharapkan mampu menyerap angkatan kerja agar tidak terjadinya pengangguran. Berdasarkan sektor ekonomi, struktur kesempatan kerja di Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor pertanian.

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa persentase tenaga kerja sektor pertanian sekitar 45 persen. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir jumlah tenaga kerja sektor pertanian mengalami penurunan.

Pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja menurun sebesar 1,85 persen dari tahun 2008 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 907256 jiwa, terus mengalami penurunan hingga akhirnya pada tahun 2011 jumlah tenaga kerja sebesar 813699 jiwa yaitu 36,76 persen dari jumlah angkatan kerja. Dari analisa ini diperoleh informasi bahwa sektor pertanian masih merupakan lapangan pekerjaan utama bagi masyarakat Sumatera Barat dan merupakan penyerap tenaga kerja terbesar.



Sumber : BPS, Sumatera Barat dalam Angka

4.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian di Sumatera Barat

Dalam lima tahun terakhir setiap tahunnya pemerintah meningkatkan anggaran untuk pembangunan sektor pertanian di Sumatera Barat. Kenaikan anggaran ini penting untuk merangsang pertumbuhan pada sektor pertanian di Sumatera Barat. Besarnya anggaran yang dialokasikan sangat bermanfaat untuk membangun sektor pertanian dalam menyediakan faktor-faktor produksi yang nantinya diharapkan memacu pertumbuhan output.

Tabel 4.7
 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Provinsi Sumatera Barat 1998-2011

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1998	3.713,51	0.00
1999	3.593,01	-3.24
2000	3.098,97	-13.75
2001	8.496,97	174.19
2002	32.723,63	285.12
2003	34.120,79	4.27
2004	36.339,01	6.50
2005	27.869,61	-23.31
2006	32.858,52	17.90
2007	49.745,30	51.39
2008	57.944,53	16.48
2009	67.107,84	15.81
2010	72.064,72	7.39
2011	97.165,83	34.83

Sumber : Djpk.depkeu.go.id

Pada tahun 1998 anggaran untuk sektor pertanian Sumatera Barat sebesar 3,713 miliar rupiah. Pada tahun 1999 dan tahun 2000 pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian terus menurun, pada tahun 1999 turun sebesar 3,24 persen menjadi 3,593 miliar rupiah. Pada tahun 2000 kembali terjadi penurunan, penurunan bahkan mencapai 13,75 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi 3,098 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh belum membaiknya perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998.

Pada tahun 2001 hingga tahun 2004 anggaran untuk sektor pertanian Sumatera Barat terus meningkat hingga mencapai 36,339 miliar rupiah pada tahun 2004. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2002 dimana terjadi peningkatan hampir tiga kali lipat dibanding dengan anggaran tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 kembali menurun sebesar 23,31 persen.

Sejak tahun 2006 anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian tidak lagi pernah mengalami penurunan hingga tahun 2011. Pada tahun 2011 pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian mencapai 97,165 miliar rupiah. Peningkatan anggaran sektor pertanian yang terus meningkat secara bertahap tiap tahunnya tentu akan berdampak baik bagi pertumbuhan sektor pertanian kedepannya.



Sumber : *Djpk.depkeu.go.id*

4.5 Upah Pekerja Pertanian di Sumatera Barat

Pengertian upah/gaji bersih menurut BPS adalah upah/gaji bersih yang biasanya diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan/pegawai baik berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan. Upah/gaji bersih yang dimaksud adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan, iuran wajib, pajak penghasilan dan lain sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan.

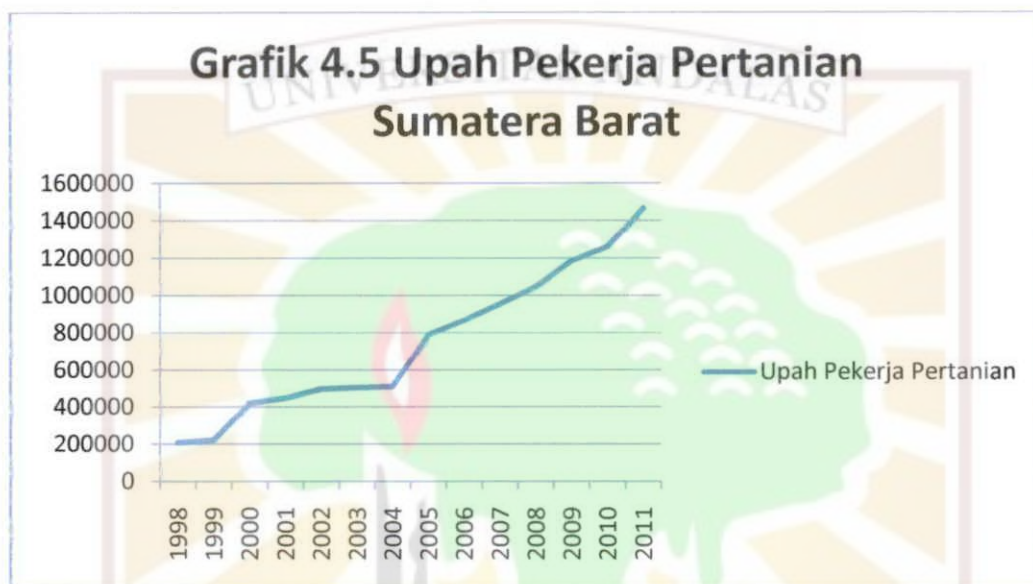
Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian. Pekerja bebas di pertanian adalah seorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi : pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan. termasuk jasa pertanian.

Tabel 4.8
Upah Pekerja Pertanian Provinsi Sumatera Barat
1998-2011

Tahun	Upah Pekerja Pertanian (Rupiah)
1998	209.185
1999	223.347
2000	420.881
2001	449.365
2002	498.355
2003	505.708
2004	510.419
2005	791.470
2006	867.300
2007	955.400
2008	1.049.000
2009	1.185.900
2010	1.261.900
2011	1.465.000

Sumber : BPS, Keadaan Pekerja/Buruh Indonesia

Terlihat pada grafik 4.5 setiap tahunnya upah pekerja pertanian di Sumatera barat terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 1998 upah pekerja pertanian adalah 209.185 rupiah, terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 1.465.000 rupiah pada tahun 2011. Upah terus meningkat sesuai dengan kebutuhan hidup yang terus bertambah.



Sumber : BPS, Keadaan Pekerja/Buruh Indonesia

4.6 Luas Lahan Pertanian Sumatera Barat

Lahan pertanian adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena lahan merupakan media tumbuh bagi tanaman. Lahan sebagai faktor produksi utama pertanian selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Penggunaan lahan yang semakin meningkat oleh manusia, seperti untuk tempat tinggal, tempat melakukan usaha, pemenuhan akses umum dan fasilitas lain akan menyebabkan lahan pertanian yang tersedia semakin menyempit.

Lahan pertanian terbagi dua, yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah (lahan kering). Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Lahan sawah mencakup pengairan, tadah hujan, sawah pasang surut, rembesan, lebah dan lain sebagainya.

Sementara yang dimaksud dengan lahan bukan sawah (lahan kering) adalah semua lahan selain lahan sawah seperti lahan pekarangan, huma, ladang, tegalan/kebun, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya. Lahan yang berstatus lahan sawah yang sudah tidak berfungsi sebagai lahan sawah lagi, dimasukkan dalam lahan bukan sawah.

Tabel 4.9
Lahan Sawah dan Bukan Sawah di Sumatera Barat
1998-2011

Tahun	Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering		
		Tegal/Kebun (Ha)	Ladang/Hulma (Ha)	Perkebunan (Ha)
1998	233554	313927	87072	546609
1999	235877	328461	89669	493065
2000	237584	336393	141153	485409
2001	236828	309484	126798	699440
2002	237063	301399	130949	712441
2003	238949	319373	160563	409711
2004	243249	304871	128112	439695
2005	253251	359895	155924	469679
2006	256150	279537	136563	514652
2007	243911	279573	136563	500726
2008	235952	289668	136043	565539
2009	238866	329528	132240	595516
2010	238529	324426	136213	610446
2011	239635	328422	128989	681262

Sumber : Dinas Pertanian Sumatera Barat

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Data

5.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi permintaan tenaga kerja sektor pertanian ada sebanyak 3 variabel. Variabel-variabel tersebut adalah variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian, upah pekerja pertanian dan luas lahan pertanian (luas ladang).

Dalam menganalisis Pengelolaan data dilakukan dengan metode analisa OLS (Ordinary Lest Square) dengan menggunakan program SPSS 16. Analisa regresi berguna untuk mangkaji pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian (X_1), upah pekerja pertanian (X_2), dan luas lahan pertanian (X_3), terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor pertanian. Model regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Dari hasil pengujian didapatkan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 14,972 + 0,072 (X_1) - 0,172 (X_2) + 0,027 (X_3)$$

$(13,756) \quad (2,777) \quad (-3,222) \quad (0,254)$

Persamaan diatas menjelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 14,792 menunjukkan jika pengeluaran pemerintah sektor pertanian, upah pekerja pertanian, dan luas lahan pertanian jumlahnya tetap maka jumlah permintaan tenaga kerja pertanian akan tumbuh sebesar 14,972 persen,

Koefisien anggaran pemerintah untuk sektor pertanian adalah sebesar 0,072 menggambarkan bahwa jika terjadi peningkatan anggaran untuk sektor pertanian sebesar 1 persen maka permintaan tenaga kerja sektor pertanian akan mengalami kenaikan sebesar 0,072 persen.

Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan adanya hubungan yang positif antara anggaran sektor pertanian dengan permintaan tenaga kerja sektor pertanian itu sendiri. Semakin tinggi anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian maka akan semakin tinggi pula permintaan tenaga kerja pada sektor pertanian. Syaratnya adalah *ceteris paribus*.

Koefisien untuk upah pekerja pertanian adalah sebesar -0,172. Berarti upah pekerja pertanian memiliki hubungan negatif dengan permintaan tenaga kerja pada sektor pertanian. Jika upah meningkat sebesar 1 persen, maka permintaan tenaga kerja pertanian akan berkurang sebesar 0,172 persen. Dengan asumsi *ceteris paribus*.

Sedangkan variabel luas lahan pertanian (luas ladang) mengalami koefisien sebesar 0,027. Koefisien ini menjelaskan bahwa jika luas lahan pertanian (luas ladang) meningkat sebesar 1 persen, maka juga akan diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja pertanian sebesar 0,027 persen.

5.1.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran terhadap asumsi klasik pada model regresi agar model yang digunakan tersebut mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi. Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa pengujian yaitu autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

5.1.2.1 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara variabel. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Durbin Watson. Dari tabel Durbin Watson untuk $n = 14$ dan $k = 3$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel bebas, diperoleh nilai dL sebesar 0,7667 dan nilai dU sebesar 1,7788. Maka dapat dirumuskan, jika :

- $1,7788 < DW < 2,2212$ maka tidak terjadi autokorelasi
- $DW < 0,7667$ atau $> 3,2333$ maka terjadi autokorelasi
- $0,7667 < DW < 1,7788$ atau $2,2212 < DW < 3,2333$ maka tidak dapat disimpulkan (ragu-ragu).

Tabel 5.1
Hasil Perhitungan Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.731 ^a	.534	.394	.05051	.534	3.820	3	10	.046	1.784

a. Predictors: (Constant), LL, GP, UP

b. Dependent Variable: LP

Sumber: Data diolah dengan SPSS.

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,784. Nilai tersebut berada' diantara 1,7788 dan 2,2212 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada penelitian ini.

5.1.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (variabel bebas) .Pada model regresi yang baik tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas, salah satunya dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF).

Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Hasil pengujian model regresi yang diperoleh menunjukkan nilai-nilai Tolerance dan VIF untuk masing-masing variabel terlihat pada tabel Coefficient.

Tabel 5.2
Hasil Perhitungan Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	14.972	1.088		13.757	.000		
GP	.072	.026	1.315	2.777	.020	.208	4.816
UP	-.172	.054	-1.631	-3.222	.009	.182	5.495
LL	.027	.106	.072	.254	.805	.582	1.718

a. Dependent Variable:
LP

Sumber: Data diolah dengan SPSS.

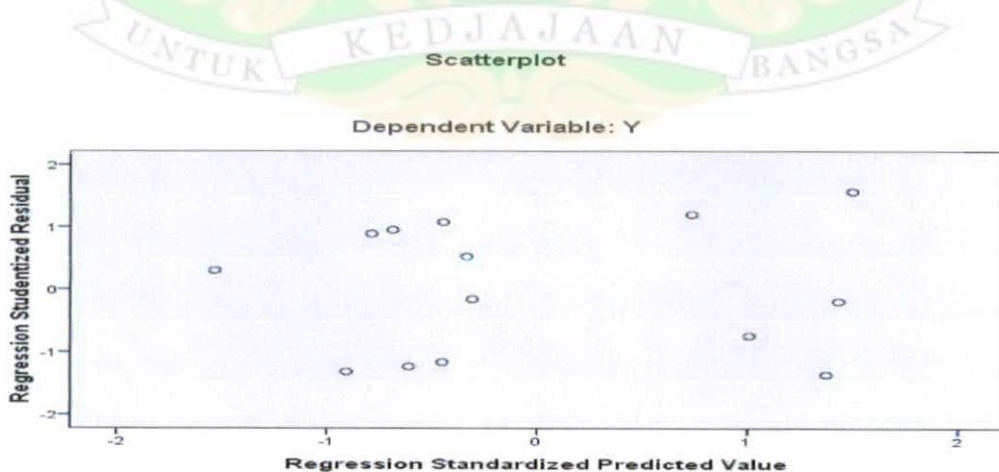
Pada tabel Coefficient menunjukkan nilai *Tolerance* untuk semua variabel independen di atas 0,10 dan nilai VIF untuk semua variabel independen juga dibawah 10. Hal ini sesuai dengan syarat tidak terjadinya multikolinearitas.

- pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian memiliki nilai tolerance 0,208 dan VIF 4,816
- Upah pekerja pertanian memiliki nilai tolerance 0,182 dan VIF 5,495
- Luas lahan pertanian (luas ladang) memiliki nilai tolerance 0,582 dan VIF 1,718

5.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan dalam model regresi terjadi kesamaan *variance* (homoskedastisitas) dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan.

Gambar 5.1



5.1.3 Pengujian Hipotesis

5.1.3.1 Uji Hipotesis Secara Simultan (F-Tes)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Uji ini menggunakan nilai F-tes seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Hasil Perhitungan Nilai F-tes
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.029	3	.010	3.820	.046 ^a
	Residual	.026	10	.003		
	Total	.055	13			

a. Predictors: (Constant), LL, GP, UP

b. Dependent Variable: LP

Sumber: Data diolah dengan SPSS.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai p-value sebesar 0,046 ($< 0,05$), maka hipotesis nol ditolak yang berarti bahwa secara keseluruhan variabel independen mempunyai hubungan linear dengan variabel dependen. Secara bersama-sama pengeluaran pemerintah, upah pekerja pertanian, dan luas lahan pertanian berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja sektor pertanian.

5.1.3.2 Uji Pengaruh Parsial (T-tes)

Uji t dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial / individu. Bila nilai signifikansi $t < 0,05$ maka variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependennya, namun sebaliknya jika nilai $t > 0,05$ maka variabel independennya secara individu tidak signifikan mempengaruhi variabel dependennya.

Berikut ini dilakukan pengujian terhadap masing-masing variabel independen yang digunakan dalam model ini:

Tabel 5.4
Hasil Perhitungan Nilai T-tes

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.972	1.088		13.757	.000		
	GP	.072	.026	1.315	2.777	.020	.208	4.816
	UP	-.172	.054	-1.631	-3.222	.009	.182	5.495
	LL	.027	.106	.072	.254	.805	.582	1.718

a. Dependent Variable: LP

Sumber: Data diolah dengan SPSS.

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Sektor Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.4 diperoleh nilai p-value sebesar 0,020 ($< 0,05$), yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian pada alfa 5%.

2. Pengaruh Upah Pekerja Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan perhitungan diperoleh p-value sebesar 0.009 ($< 0,05$), yang berarti bahwa upah pekerja pertanian berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian pada alfa 5%.

3. Pengaruh Luas Lahan Pertanian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai p-value sebesar 0,805 ($> 0,05$), yang berarti bahwa luas lahan pertanian tidak signifikan berpengaruh terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.

5.1.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabilitas variabel dependen dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh hasil nilai koefisien determinasi seperti dalam tabel 5.2.

Tabel 5.5
Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.731 ^a	.534	.394	.05051	.534	3.820	3	10	.046	1.784

a. Predictors: (Constant), LL, GP, UP

b. Dependent Variable: LP

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Dari pengujian terhadap model persamaan regresi tersebut menghasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,731. Nilai tersebut artinya yaitu sebesar 73,1 persen jumlah tenaga kerja sektor pertanian dapat diterangkan oleh variabel-variabel yang terdapat dalam model, sedangkan sisanya sebesar 26,9 persen diterangkan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

5.2 Pembahasan Hasil

Berdasarkan hasil olahan data diketahui bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, upah pekerja pertanian dan luas lahan pertanian secara bersama-sama mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera Barat. Nilai koefisien yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikatnya adalah sebesar 0,731. Hal ini berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya sebesar 73,1 persen dan sisanya sebesar 26,9 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Secara parsial pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera Barat dengan selang kepercayaan 95 persen. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah adalah sebesar 0,072. Hal ini menunjukkan apabila terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pertanian di Sumatera Barat sebesar 1 persen maka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian akan mengalami kenaikan sebesar 0,072 persen dengan asumsi *ceteris paribus*.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyarsono, *et.al* (2004) yang mana hasil dari penelitian menyebutkan investasi untuk peningkatan output sektor pertanian memiliki dampak yang lebih besar terhadap faktor produksi tenaga kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Persentase penyerapan tenaga kerja terbesar untuk sektor pertanian terdapat pada sektor tanaman pangan (12.23%).

Variabel upah pekerja pertanian yang menunjukkan hubungan negatif dan signifikan pada selang kepercayaan 95 persen terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Nilai koefisien upah pekerja pertanian adalah sebesar -0,172. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan upah pekerja pertanian sebesar 1 persen maka akan mengurangi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sebesar 0,172 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi yaitu semakin tinggi tingkat upah semakin sedikit jumlah tenaga kerja yang diminta oleh produsen dan sebaliknya semakin rendah tingkat upah semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang diminta produsen.

Hasil ini sesuai dengan penelitian oleh Sentosa (1992) yang mana hasil dari penelitian menyebutkan bahwa terjadi penurunan permintaan tenaga kerja pertanian di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 0,17 persen apabila terjadi kenaikan upah riil tenaga kerja 1 persen dengan asumsi faktor lain tidak mengalami perubahan. Kondisi ini diduga dengan masalah pemilihan teknologi pertanian. Tingginya upah nominal tenaga kerja manusia dan ternak dibandingkan upah tenaga kerja traktor memungkinkan bagi produsen untuk lebih menggunakan traktor dalam pengelolaan sawah seandainya persediaan tenaga kerja traktor cukup dan kondisi sawah petani memungkinkan untuk diolah dengan traktor.

Kasyrno (1983) dalam Sentosa (1992) juga menemukan bahwa penggunaan traktor dalam pengelolaan tanah didorong oleh naiknya tingkat upah tenaga kerja manusia dan ternak, sedangkan sewa barang modal relatif tetap atau naik lebih lambat.

Variabel luas lahan yang menunjukkan hubungan yang positif dengan penyerapan tenaga kerja pertanian di Sumatera Barat dengan tingkat pengaruh sebesar 0,027 persen. itu artinya penambahan luas lahan pertanian juga akan diikuti dengan penambahan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera Barat. Namun pengaruh yang diberikan tidaklah signifikan pada taraf nyata α 5%.

Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Yennetri (1998), yang mana hasil temuan menyebutkan bahwa parameter dugaan luas areal tanaman pangan sebesar satu hektar akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sebesar 0,0808 orang, ceteris paribus. Temuan Yennetri juga tidak signifikan pada taraf nyata α 5%.

Berdasarkan hasil temuan Yennetri menyebutkan bahwa kesempatan kerja sektor pertanian ternyata tidak responsif terhadap luas areal tanaman pangan. Sifat inelastis kesempatan kerja terhadap peubah luas areal tanaman pangan. Sifat inelastis kesempatan kerja terhadap peubah luas areal tanaman pangan ini disebabkan karena intensitas tanah dilahan sawah dan juga di lahan kering relatif rendah. Jika intensitas tanam rendah maka produksi juga akan rendah, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi juga tidak banyak.

Selain itu, tidak responsifnya kesempatan kerja sektor pertanian terhadap luas lahan pertanian disebabkan oleh faktor kepemilikan tanah. Di Sumatera Barat mayoritas tanah dimiliki secara komunal oleh kaum (suku) yang disebut dengan tanah ulayat. Hukum adat menjelaskan tidak adanya istilah hak milik penuh pada tanah ulayat, yang ada hanyalah hak pakai. Kepemilikan tanah ulayat dipegang oleh bundo kanduang di dalam kaum, dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu.

5.3 Implikasi Kebijakan

Sektor pertanian sebagai sektor yang padat karya diharapkan dapat mengurangi beban pengangguran. Dengan berkurangnya beban pengangguran dapat menekan tingkat kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Di Sumatera Barat sektor pertanian masih tetap merupakan sumber kesempatan kerja yang potensial terutama di daerah pedesaan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian dan menjamin kesejahteraan petani pemerintah diharapkan terus memberikan perhatian terhadap sektor pertanian. Pemerintah diharapkan terus memperhatikan faktor-faktor penting yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Adapun implikasi kebijakan yang dapat penulis berikan adalah :

1. Kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mendukung upaya peningkatan anggaran sektor pertanian untuk pembangunan infrastruktur, pembiayaan modal dan subsidi bahan baku pertanian yang telah terbukti secara empiris memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera Barat.

2. Untuk mensiasati rendahnya upah pekerja pertanian, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan jaminan sosial seperti jaminan pendidikan, jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya bagi petani guna menjamin kesejahteraan petani. Adanya program jaminan sosial bagi petani menjadi faktor penarik penawaran tenaga kerja sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian.
3. Perlunya peningkatan peran pemerintah dalam mempertahankan lahan-lahan pertanian, antara lain dengan mengurangi dan memperkecil alih fungsi (konversi) lahan dari sektor pertanian menjadi sektor non-pertanian
4. Program sertifikasi tanah petani yang merupakan kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pertanahan Nasional RI diharapkan terus berjalan. Disamping memberikan kepastian hukum atas tanah yang diusahakan petani, sertifikat tanah yang dimiliki dapat dijadikan sebagai alat penjamin bagi petani dalam rangka penguatan kemampuan permodalan usaha taninya.

BAB VI

PENUTUP

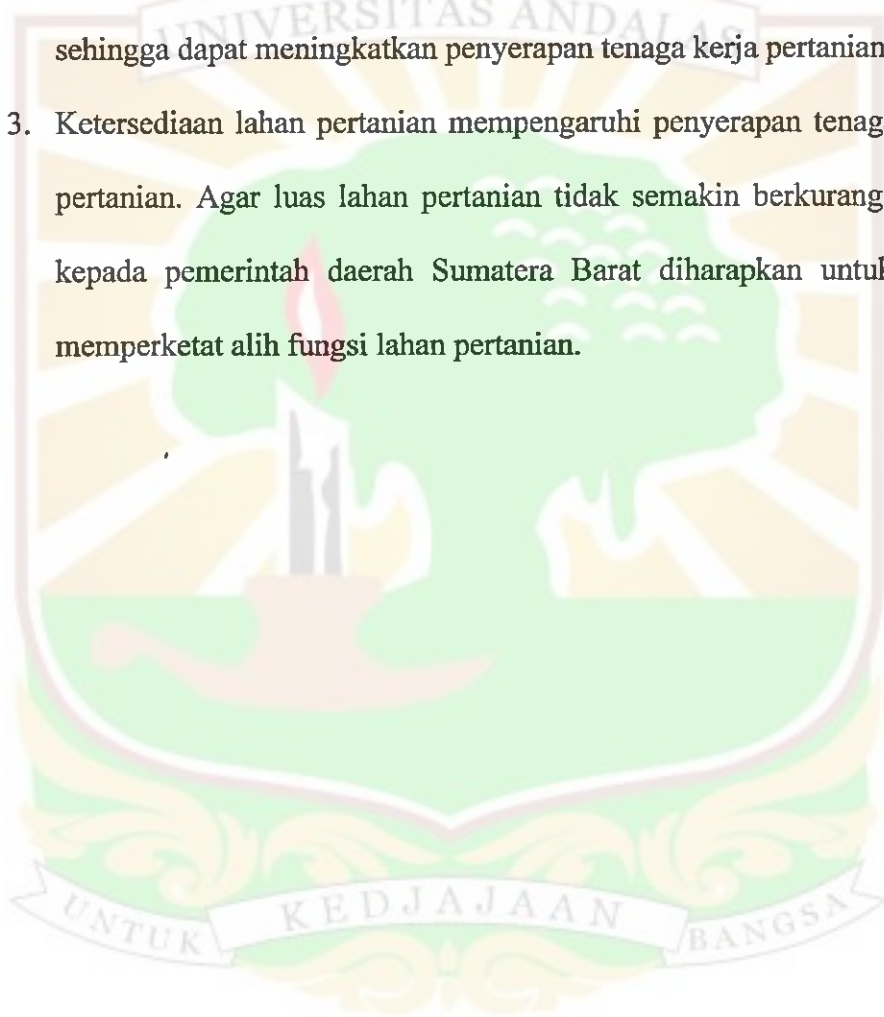
6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Separuh dari angkatan kerja di Sumatera Barat bekerja pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Jika dilihat dari struktur ekonomi kesempatan kerja di sektor pertanian lebih tinggi dibanding sektor ekonomi lainnya.
2. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian secara positif dan signifikan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja pertanian di Sumatera Barat. Pengeluaran pemerintah sebagai bentuk investasi pada sektor pertanian memegang peranan penting dalam mengembangkan sektor pertanian agar mampu menciptakan kesempatan kerja.
3. Upah pekerja sektor pertanian secara negatif dan signifikan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera Barat.
4. Luas lahan pertanian secara positif namun tidak signifikan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja sektor pertanian di Sumatera Barat. Tidak responsifnya kesempatan kerja sektor pertanian terhadap luas areal lahan pertanian disebabkan oleh keterbatasan penguasaan lahan. Kepemilikan tanah yang merupakan tanah ulayat di Sumatera Barat menjadikan banyaknya petani yang hanya sebagai petani penggarap.

6.2 Saran

1. Peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian dianggap perlu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian.
2. Dibutuhkan perhatian pemerintah kepada petani dalam bentuk program jaminan sosial guna mensejahterakan upah rendah pada pekerja pertanian, sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian.
3. Ketersediaan lahan pertanian mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pertanian. Agar luas lahan pertanian tidak semakin berkurang, maka kepada pemerintah daerah Sumatera Barat diharapkan untuk terus memperketat alih fungsi lahan pertanian.



DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris, 1990, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arifin imamul dan Gina Hadi W, 2009, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, PT Grafindo Media Pratama
- Arsyad, Lincolin, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, *Sumbar Dalam Angka*, BPS Indonesia, 1998-2011.
- Badan Pusat Statistik, *Keadaan Pekerja/Buruh Indonesia*, BPS Indonesia, 1998-2011.
- Bastias, Desi Dwi, 2010, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bintarto, 1977, *Pola Kota dan Permasalahannya*, Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM.
- Boa H, 2008, *Analisis Model Kemiskinan Perdesaan di Indonesia*, EPP, Vol 5, No 1, 2008: 16-22.
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Ed ke-1, Yogyakarta, BPFE.
- Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Dumairy, 2001, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Elfindri, Nasri Bachtiar, 2004, *Ekonomi Ketenagakerjaan*, Andalas University Press, Padang.
- Elfindri, 2008, *Strategi Sukses Membangun Daerah*, Gorga Media

Elizabeth, Roosgandha, 2000, *Revitalisasi Ketenagakerjaan Dan Kesempatan Kerja Terkait Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan*, Bogor : Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Gujarati DN, 2003, *Basic Econometrics : Fourth Editio*, McGraw Hill, Boston

Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Handari DAM, 2006, *Dampak Investasi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian di Indonesia (Analisis Input-Output) [Skripsi]*, Bogor, Fakultas Ekonomi Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Iqbal, M dan Sumaryanto, 2007, *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Bogor : Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Kartasapoetra, G, 1992, *Praktik Pengelolaan Koperasi*. Rineka Cipta, Jakarta.

Mangkosoebroto, Guritno, 1997, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta.

Mubyarto, 1986, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3ES, Jakarta.

Nicholson, Walter, 2001, *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya Edisi Delapan*, Erlangga, Jakarta.

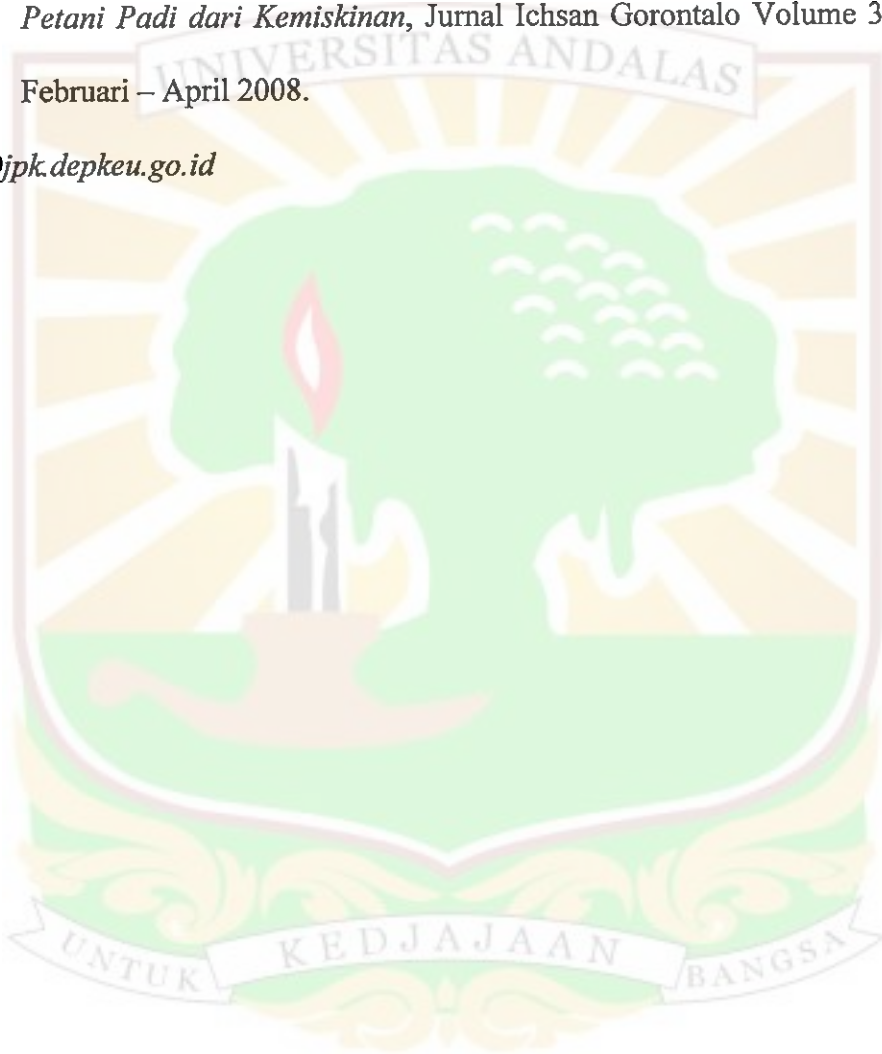
Priyarsono, D.S. & A. Daryanto, 2004. *Peranan Pertanian dalam Mengatasi Masalah Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketahanan Pangan*. Laporan Akhir, Hibah Penelitian Tim Pascasarjana. Didanai oleh Depdiknas. Institut Pertanian Bogor.

- Rusastra IW, Suryadi M, 2004, *Ekonomi Tenaga Kerja Pertanian dan Implikasinya Dalam Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Buruh Tani*, Jurnal Litbang Pertanian 23 (3):91-99.
- Sandy, IM, 1985, *DAS – Ekosistem Penggunaan Tanah*, Publikasi Direktorat Taguna Tanah Departemen Dalam Negri (Publikasi 437).
- Sentosa, Sri Ulfa, 1992, *Permintaan Tenaga Kerja Dalam Usaha Padi Sawah di Kabupaten Padang Pariaman*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Simajuntak, P, 1999, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penerbit Fakutas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sitorus, S.R.P, 1989, *Survey Tanah dan Penggunaan Lahan*, Laboratorium Perencanaan Sumberdaya Lahan Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sukirno, Sadono, 2000, *Makro Ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 2005, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumarsono, Sony, 2003, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suparmoko, M, 2000, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi 4*, Yogyakarta, BPFE.
- Supriyati, 2010, *Dinamika Ekonomi Ketenagakerjaan Pertanian : Permasalahan dan Kebijakan Strategis Pengembangan*, Analisis Kebijakan Pertanian Volume 8 No.1: 49-65.

Syam A dan Khairina MN, 2000, *Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Penyediaan Lapangan Kerja dan Perbandingannya Dengan Sektor-Sektor Lain*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor.

Yasin M, 2008, *Kebijakan Kredit Panen Sebagai Instrumen Guna Mengangkat Petani Padi dari Kemiskinan*, Jurnal Ichsan Gorontalo Volume 3, No 1 Februari – April 2008.

www.Djpk.depkeu.go.id



Lampiran 1 :

DATA MENTAH 1998 - 2011

Tahun	TKP	GP (Jutaan)	UPP	LL (Ha)
1998	916132	3713.51	209185	87072
1999	972841	3593.01	223347	89669
2000	841418	3098.97	420881	141153
2001	877922	8496.97	449365	126798
2002	902241	32723.63	498355	130949
2003	1017375	34120.79	505708	160563
2004	952492	36339.01	510419	128112
2005	833410	27869.61	791470	155924
2006	821996	32858.52	867300	136563
2007	905575	49745.30	955400	136563
2008	924314	57944.53	1049000	136043
2009	907256	67107.84	1185900	132240
2010	900306	72064.72	1261900	136213
2011	813699	97165.83	1465000	128989

Ket :

TKP : Tenaga Kerja Pertanian

GP : Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian

UPP : Upah Pekerja Pertanian

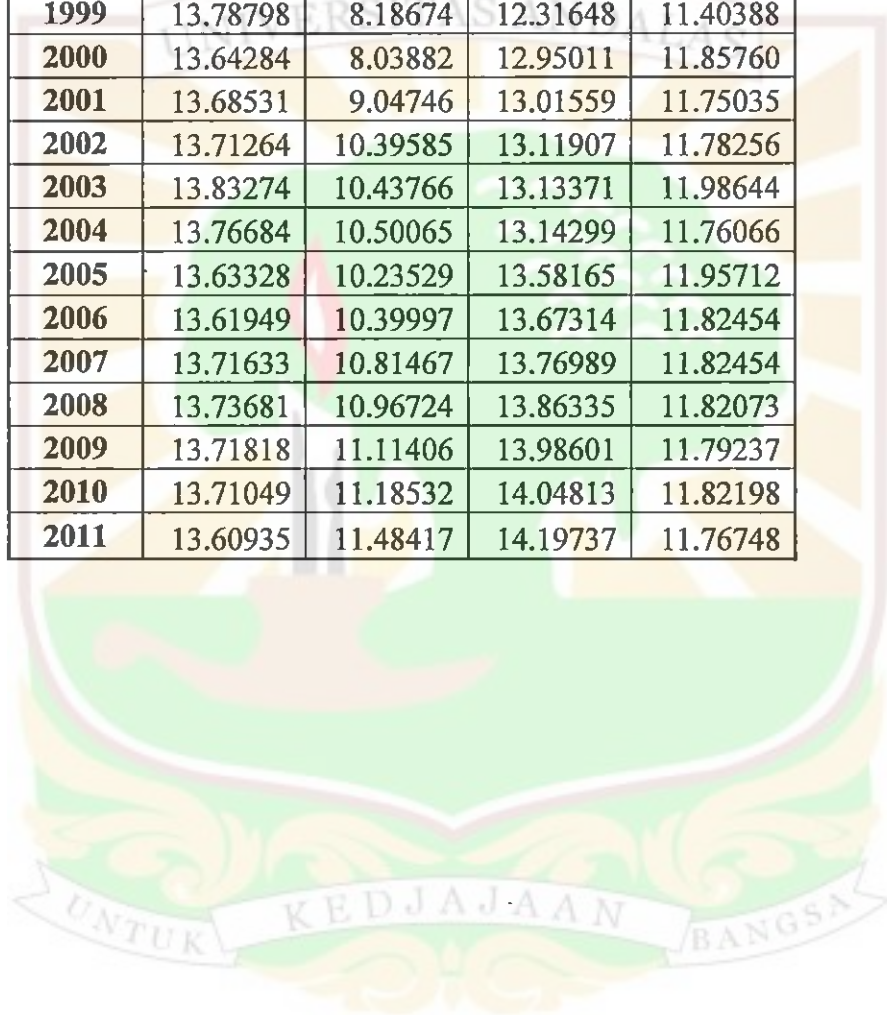
LL : Luas Lahan Peranian (Luas Ladang)



Lampiran 2 :

**DATA LOGARITMA INVESTASI PEMERINTAH
UPAH,DAN LUAS LAHAN
1998-2011**

Tahun	TKP	GP	Upah	LL
1998	13.72792	8.21973	12.25097	11.37449
1999	13.78798	8.18674	12.31648	11.40388
2000	13.64284	8.03882	12.95011	11.85760
2001	13.68531	9.04746	13.01559	11.75035
2002	13.71264	10.39585	13.11907	11.78256
2003	13.83274	10.43766	13.13371	11.98644
2004	13.76684	10.50065	13.14299	11.76066
2005	13.63328	10.23529	13.58165	11.95712
2006	13.61949	10.39997	13.67314	11.82454
2007	13.71633	10.81467	13.76989	11.82454
2008	13.73681	10.96724	13.86335	11.82073
2009	13.71818	11.11406	13.98601	11.79237
2010	13.71049	11.18532	14.04813	11.82198
2011	13.60935	11.48417	14.19737	11.76748



Lampiran 3 :

Hasil Regresi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.731 ^a	.534	.394	.05051	.534	3.820	3	10	.046	1.784

a. Predictors: (Constant), LL, GP, UP

b. Dependent Variable: LP

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.029	3	.010	3.820	.046 ^a
	Residual	.026	10	.003		
	Total	.055	13			

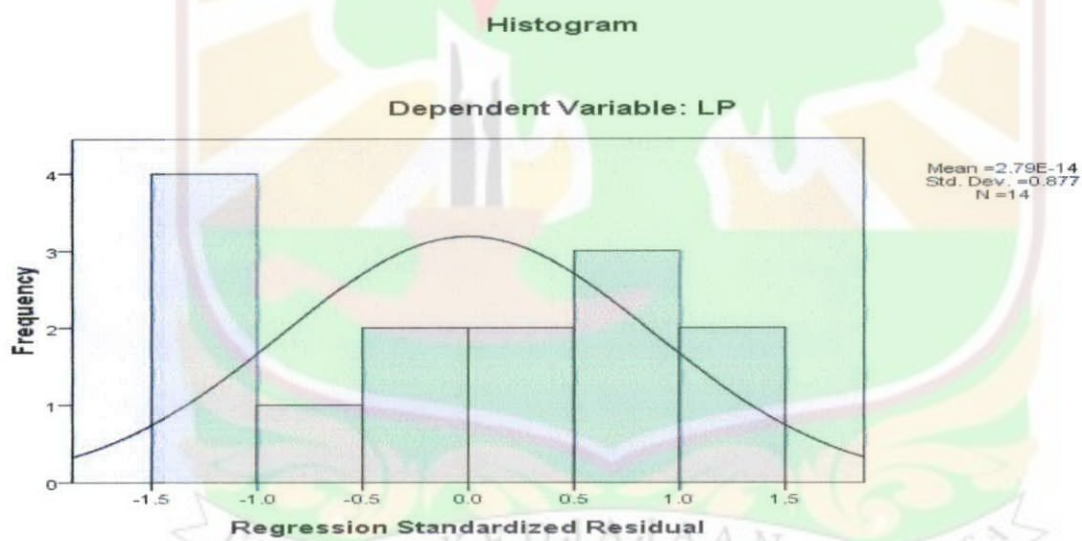
a. Predictors: (Constant), LL, GP, UP

b. Dependent Variable: LP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.972	1.088		13.757	.000		
	GP	.072	.026	1.315	2.777	.020	.208	4.816
	UP	-.172	.054	-1.631	-3.222	.009	.182	5.495
	LL	.027	.106	.072	.254	.805	.582	1.718

a. Dependent Variable: LP



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

